

**MANAJEMEN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SEKOLAH DASAR  
GUNUNG SARI DALAM KOTA CIREBON**

**INCLUSIVE EDUCATION MANAGEMENT IN PRIMARY SCHOOLS GUNUNG  
SARI DALAM CIREBON CITY**

**Asep Kurniawan**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

[asepqurniawan.ak@gmail.com](mailto:asepqurniawan.ak@gmail.com)

**Abstract**

*The purpose of this paper was to describe the management of inclusive education in state primary school Gunung Sari Dalam. This was descriptive qualitative research. Data collection techniques are in-depth observation, in-depth interviews and documentation. Testing the validity of the data used source and method triangulation. The analysis was carried out through data collection, data reduction, data display, and data conclusion. The finding was the management of inclusive education at Elementary School Gunung Sari Dalam was carried out in accordance with the appropriate stages. Student management began with planning for new student admissions. The implementation was through the inclusion stage, the identification and assessment of the school, however, did not involve experts. The school used a modified 2013 curriculum. The learning process management was begun by analyzing the learning objectives. The teacher also adapted learning and evaluation to the conditions of students. In addition, teacher management was begun by list of teacher needs, recruitment and selection according to special educational backgrounds. The division of special teacher work rested on agreement and coordination. Facilities and infrastructure management was carried out through planning based on a needs analysis and procurement.*

**Keywords:** *Management, inclusive education, diffable student*

**Abstrak**

Tujuan dari makalah ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan pendidikan inklusif di SDN Gunung Sari Dalam. Ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah observasi mendalam, wawancara mendalam dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Analisis dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data,

dan penarikan kesimpulan. Temuannya adalah pengelolaan pendidikan inklusi di SD Gunung Sari Dalam telah dilaksanakan sesuai tahapan. Pengelolaan siswa dimulai dengan perencanaan penerimaan siswa baru. Pelaksanaannya melalui tahap inklusi, identifikasi dan penilaian sekolah, namun tidak melibatkan tenaga ahli. Sekolah tersebut menggunakan kurikulum 2013 yang dimodifikasi. Pengelolaan proses pembelajaran diawali dengan menganalisis tujuan pembelajaran. Guru juga menyesuaikan pembelajaran dan evaluasi dengan kondisi siswa. Selain itu, pengelolaan guru diawali dengan daftar kebutuhan guru, rekrutmen dan seleksi sesuai latar belakang pendidikan khusus. Pembagian tugas guru khusus bertumpu pada kesepakatan dan koordinasi. Pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan melalui perencanaan berdasarkan analisis kebutuhan dan pengadaan.

**Kata kunci :** Manajemen, pendidikan inklusif, siswa difabel

## PENDAHULUAN

Uraian Pendidikan adalah hak dasar semua Warga Negara Indonesia, termasuk bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pada Pasal 5 Ayat 1, bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Peran pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan yang merata tentu sangat penting dan berpengaruh dalam pengembangan pendidikan. Selama ini siswa berkebutuhan khusus diberikan sarana pendidikan khusus diselaraskan dengan jenis dan derajat kekhususannya yang dinamakan dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Akan tetapi, Sekolah Luar Biasa masih menjadi jurang pemisah bagi siswa yang berkebutuhan khusus dengan siswa pada umumnya, hal tersebut menghambat proses interaksi di antara mereka. Akibatnya siswa berkebutuhan khusus menjadi kelompok yang termarginalkan dalam interaksi sosial di masyarakat. Misalnya, banyak sekali orang yang mempunyai kemampuan berbeda secara fisik harus tersingkir dari dunia pendidikan ataupun pekerjaan (Asyhabuddin, 2008:406). Hal yang sama juga dijelaskan oleh Purwandari (2009), bahwa siswa berkebutuhan khusus memperoleh perlakuan yang berbeda dalam hal berbagai layanan pendidikan, sebab mereka dinilai mempunyai hambatan dalam sejumlah dimensi kehidupan, sehingga dalam layanan pendidikannya harus terpisah dari siswa yang “normal” supaya proses pembelajaran tidak terganggu. Masyarakat menjadi tidak akrab dengan siswa berkebutuhan khusus, dan begitu pula sebaliknya, siswa berkebutuhan khusus merasa bukan bagian dari kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Sekolah inklusif adalah salah satu wujud pemerataan pendidikan tanpa membedakan antara siswa berkebutuhan khusus dan siswa pada umumnya bisa mendapatkan pendidikan yang sama. Pendidikan inklusi menempatkan anak berkelainan tingkat

ringan, sedang dan berat secara penuh di kelas regular (Tarmansyah, 2009:76). Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif menjelaskan bahwa siswa sekolah inklusif merupakan sekolah umum yang mengakomodasi semua siswa tanpa menghiraukan keadaan fisik, emosional, linguistik, sosial, intelektual, atau kondisi lain mereka, termasuk siswa berkebutuhan khusus. Kerjasama dari sejumlah pihak baik itu masyarakat, sekolah, maupun pemerintah sangat berpengaruh dalam pelaksanaannya, sebab sekolah inklusif adalah tantangan baru bagi pihak sekolah dan masyarakat. Melalui penyelenggaraan sekolah inklusif ini diharapkan dapat menciptakan generasi penerus yang bisa memahami dan menerima berbagai bentuk perbedaan dan tidak membangun diskriminasi dalam kehidupan masyarakat ke depannya. Perbedaan dalam pendidikan inklusif di sini dinilai sebagai sumber belajar, ketimbang sebagai masalah (Sutrisno, 2012:32).

Pendidikan adalah kebutuhan asasi semua manusia yang akan berlangsung sepanjang hayat sehingga manusia lebih bermartabat. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memberi pelayanan pendidikan yang berkualitas kepada semua warganya tanpa terkecuali termasuk mereka yang mempunyai perbedaan dalam kemampuan (difabel).

Meski undang-undang sudah secara tegas mengatur pemerataan hak dan kewajiban untuk setiap warga negara untuk mengakses pendidikan, permasalahan diskriminasi dalam bidang pendidikan masih acapkali terjadi khususnya terhadap anak berkebutuhan khusus. Berdasarkan data bahwa sekarang ini dari jumlah anak berkebutuhan khusus sejumlah 192.000 yang ada di Jawa Barat, angka partisipasi sekolahnya baru sebesar 16% saja (Pikiran Rakyat, 2015). Keadaan ini diperparah oleh hasil penelitian Subagyo bahwa sekolah belum memiliki kesiapan yang baik dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif (2012).

Penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang pendidikan inklusif seperti penelitian Berry (2006) lebih mengarah kepada pembahasan sikap guru terhadap inklusif. Ia menemukan bahwa kelas inklusif yang efektif bersumber dari keyakinan yang dimiliki guru tentang kepercayaan dan perlindungan untuk memperbaiki prestasi akademik peserta didik. Demikian pula dengan penelitian Leatherman dan Niemeyer (2005) yang mengungkapkan sikap guru melalui tiga komponen domain, yakni psikomotor, afeksi, dan kognisi yang memperlihatkan lima bentuk sikap guru terhadap inklusif, yakni sikap terhadap siswa berkebutuhan khusus di dalam kelas, sikap guru dipengaruhi oleh pengalaman yang dimilikinya dalam mengajar di kelas inklusif, guru menunjukkan kebutuhan setiap siswa di dalam kelas, guru memfokuskan pada pentingnya keterlibatan keluarga dari para peserta didik untuk merancang program belajar, bagi guru ketersediaan sarana dalam kelas bisa menjadi salah satu pendukung kelas inklusif yang efektif. Penelitian-penelitian tersebut hanya mengkaji pada aspek perspektif guru terhadap pendidikan inklusif. Padahal kesuksesan pendidikan inklusif tidak hanya tertuju pada figur dan pandangan guru, ada faktor yang lain yang sangat penting yaitu manajemen, karena manajemen ini selain terkait dengan pengelolaan guru sebagai salah satu sumber daya manusianya, juga komponen manajemen pendidikan inklusif yang lain seperti siswa, kurikulum, pembelajaran, dan sarana prasarana. Manajemen sebagai faktor yang berkontribusi besar bagi keberhasilan pendidikan. Hal ini sebagaimana sudah banyak dibuktikan dalam banyak penelitian seperti Dacholfany et al, (2018), Arar dan Nasra (2020), dan Anwar (2018).

SDN Gunungsari Dalam Kota Cirebon adalah SD yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota agar bisa menyelenggarakan pendidikan inklusif disamping SD Pesantren, SD Samadikun, dan SD Cangkol. SDN Gunungsari Dalam berdasarkan studi

awal sudah melaksanakan pendidikan inklusif dengan baik. Hal ini disebabkan karena pengelolaan pendidikan yang ada terutama yang terkait dengan sejumlah guru sudah cukup memiliki pengalaman dan telah pernah mengikuti pelatihan ataupun workshop mengenai anak berkebutuhan khusus sehingga pembelajaran pun dapat terlaksana dengan keadilan tanpa diskriminasi. Oleh karena ini penelitian ini cukup penting ditindak lanjuti untuk mengungkap secara mendalam bagaimana manajemen pendidikan inklusif di jalankan di SDN Gunungsari Dalam Kota Cirebon sehingga bisa dijadikan sebagai bahan masukan bagi penyelenggaraan pendidikan serupa di lembaga pendidikan yang lain.

## **METODE**

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Gunung Sari Dalam Kota Cirebon. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Data yang didapatkan berupa data kualitatif. Subjek dalam penelitian ini ialah orang atau hal yang dijadikan sumber penelitian. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah unsur dari Sekolah, yakni kepala sekolah, guru, dan siswa berkebutuhan khusus. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini ialah dengan metode pokok berupa observasi mendalam, wawancara mendalam terhadap kepala sekolah, guru, dan siswa. Disamping itu, metode pokok di atas metode bantu berupa dokumentasi mencari data yang terkait dengan keperluan pelaksanaan penelitian seperti notulen rapat, buku-buku, agenda, catatan, dan lain sebagainya untuk memperoleh data yang bersifat tertulis seperti data sekolah, siswa, guru, dan lain-lain. Pengujian keabsahan data memakai triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dengan mengecek jawaban dari responden berdasarkan hasil observasi, hasil wawancara, dan hasil penelusuran dokumentasi. Analisis data kualitatif mengacu kepada model Miles dan Huberman diawali pengumpulan data,

reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Manajemen Siswa Pendidikan Inklusif SDN Gunung Sari Dalam

Hasil Amirin et al (2010:51) mengatakan bahwa dalam perencanaan siswa harus memperhatikan prosedur-prosedur tertentu. Manajemen siswa di SDN Gunung Sari Dalam dilaksanakan sejalan dengan prosedur penyelenggaraan PPDB Kota Cirebon. Perencanaan siswa baru diawali dengan aktivitas analisis kebutuhan siswa. Adapun perencanaan dalam aktivitas analisis kebutuhan siswa diantaranya sekolah merencanakan jumlah siswa baru dengan mempertimbangkan kelas yang ada, merencanakan program aktivitas kesiswaan serta pembentukan panitia penerimaan siswa baru. Dalam penerimaan siswa berkebutuhan khusus sekolah menerima masing-masing jenis keterbatasan siswa, akan tetapi diselaraskan dengan ketersediaan sarana-prasarana sekolah dan sumber daya.

Pelaksanaan penerimaan siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusif melalui jalur inklusif dilakukan dengan merujuk pada mekanisme dan persyaratan pendaftaran yang tertuang dalam pedoman penyelenggaraan penerimaan siswa Kabupaten Kota, akan tetapi dalam mengidentifikasi dan menilai, pihak sekolah tidak melibatkan tenaga ahli terkait seperti dokter, psikolog, maupun spesifik lainnya. Sekolah ini menerima 10% siswa berkebutuhan khusus dari total seluruh siswa yang diterima.

Berdasarkan data yang didapatkan sampai sekarang ini siswa berkebutuhan khusus yang diterima hanya siswa yang mempunyai ketunaan ringan seperti tuna rungu (mampu bahasa oral), autis ringan, tuna grahita ringan, *low vision*, dan *slow learner*. Hal tersebut disebabkan agar pelayanan yang diberikan bisa optimal sejalan dengan tujuan pendidikan inklusif

(Miles and Singal, 2010:11; Munawir et al, 2012:20).

Pembagian kelas dilaksanakan secara random dengan menggunakan model kelas reguler dengan *pull out* bagi siswa berkebutuhan khusus, jadi siswa berkebutuhan khusus belajar bersama dengan siswa reguler di kelas reguler, akan tetapi kadang-kadang siswa berkebutuhan khusus dipindahkan ke ruang sumber untuk belajar bersama dengan guru pembimbing khusus. Masing-masing kelas ada satu siswa berkebutuhan khusus yang duduk bersebelahan dengan siswa reguler dalam satu kelompok belajar. Dengan pengkondisian belajar ini diharapkan ada kesempatan bagi siswa untuk belajar bersama dan saling membantu demi ketercapaian tujuan pembelajaran. Dal hal ini, siswa difabel mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pembinaan dan pengembangan diri, baik melalui program kurikuler ataupun program ekstrakurikuler.

### 2. Manajemen Kurikulum Pendidikan Inklusif SDN Gunung Sari Dalam

Manajemen kurikulum pendidikan inklusif di sekolah ini dengan menerapkan kurikulum 2013 yang disesuaikan dengan kondisi sekolah. Kata disesuaikan atau modifikasi kurikulum menurut Mudjito et al adalah perpaduan antara kurikulum umum dengan kurikulum berkebutuhan khusus yang tidak bisa mengikuti kurikulum umum dan yang diindividualisasikan sepenuhnya. Hal ini disebabkan siswa berkebutuhan khusus yang sama sekali tidak bisa mengikuti kurikulum umum (Mudjito et al, 2014: 87-88).

Perangkat-perangkat kurikulum seperti silabus dan RPP disesuaikan oleh guru-guru mata pelajaran. Adapun komponen kurikulum yang disesuaikan menyangkut aspek tujuan, materi, proses, dan evaluasi. Ada sejumlah perangkat pembelajaran khusus bagi siswa berkebutuhan khusus yang dinamakan dengan istilah program pembelajaran individual. Dalam penyusunan dan pelaksanaan pembelajaran ini, pihak sekolah tidak melibatkan orang

tua, psikolog ataupun terapis. Sebagaimana dijelaskan oleh Sagala bahwa pengembangan kurikulum dilaksanakan oleh orang-orang yang mempunyai wawasan terkait dengan kurikulum sehingga pembelajaran berlangsung menarik dan menyenangkan bagi para siswa (2009:95-96). Modifikasi tersebut diselaraskan dengan kemampuan dan hambatan yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik (Mudjito et al, 2014:225).

### 3. Manajemen Pembelajaran Pendidikan Inklusif SDN Gunung Sari Dalam

Manajemen proses pembelajaran di kelas inklusif diawali dengan adanya perencanaan pembelajaran yang diselaraskan dengan kebutuhan siswa dan mengarah kepada kurikulum yang berlaku yakni kurikulum yang disesuaikan. Proses perencanaan pembelajaran menyangkut aktivitas menganalisis standar kompetensi lulus dan kompetensi dasar, selanjutnya guru mata pelajaran menyusun dan menyusun RPP dengan menetapkan sasaran, tujuan, materi, media dan instrumen evaluasi pembelajaran. Dalam pembuatan RPP yang disesuaikan dengan mempertimbangkan hasil penilaian serta melibatkan guru pembimbing khusus. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Irwanto dan Suryana bahwa memang dalam pembuatan RPP yang disesuaikan ini seyogyanya memperhatikan keterlibatan guru pembimbing khusus dan hasil asesmen (2016:168).

Pembelajaran di kelas inklusif dilakukan sejalan dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disesuaikan. Proses pembelajaran mempunyai sejumlah tahapan pendahuluan, inti dan penutup. Dalam pelaksanaan pembelajaran guru menerapkan metode, media, bahan latihan dan sejumlah langkah pembelajaran secara sistematis sejalan dengan RPP yang diterapkan. Adanya interaksi antara guru dengan siswa melalui pemberian tugas dan diskusi kelompok sehingga siswa berkebutuhan khusus terlibat dalam aktivitas pembelajaran di kelas. Selama aktivitas pembelajaran berlangsung guru melaksanakan penilaian secara tertulis ataupun melalui pengamatan.

Sejauh yang peneliti temukan di lapangan perlakuan siswa yang berkebutuhan khusus dengan siswa yang lain tidak dibedakan. Artinya mereka diperlakukan sama.

Evaluasi bagi siswa berkebutuhan khusus meliputi tiga domain penilaian, yakni domain keterampilan, domain kognitif, dan domain afektif yang diselaraskan dengan kemampuan dan karakteristik setiap siswa berkebutuhan khusus dengan mengimplementasikan standar nilai yang disesuaikan.

### 4. Manajemen Tenaga Pendidik Pendidikan Inklusif SDN Gunung Sari Dalam

Perencanaan tenaga pendidik khusus dimulai dengan mendata kebutuhan guru bagi siswa berkebutuhan khusus. Selanjutnya pihak sekolah mengajukannya ke Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Hal ini sejalan yang diutarakan oleh Ilahi (2013:178) dan Sharma et al (2013:6) bahwa faktor kesuksesan pendidikan inklusif ialah terdapatnya guru yang profesional dalam bidangnya masing-masing untuk mengayomi dan membina siswa berkebutuhan khusus.

Guru pembimbing khusus ikut berperan penting dalam memberi penanganan bagi siswa berkebutuhan khusus. Data yang didapatkan memperlihatkan bahwa, pembagian tugas guru pembimbing khusus berpijak pada koordinasi dan kesepakatan antara guru pembimbing khusus dengan tim pendidikan inklusif. Koordinasi dan tugas guru pembimbing khusus mencakup menyusun dan melakukan penilaian, membuat dan menjalankan program pembelajaran individual melalui kerjasama dengan guru mata pelajaran, membantu guru mata pelajaran dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang disesuaikan, membantu guru mata pelajaran dalam menangani tingkah laku siswa berkebutuhan khusus di kelas serta melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan pihak sekolah, guru, dan orang tua siswa terkait perkembangan siswa berkebutuhan khusus di sekolah.

Kerjasama antara sekolah dan pihak-pihak terkait juga menjadi kunci kesuksesan

pendidikan inklusif. Berbagai literatur pendidikan inklusif mengindikasikan bahwa membangun jaringan antara sekolah dan organisasi yang terkait sudah menjadi pendekatan yang efektif guna membangun pelaksanaan pendidikan inklusif di sejumlah negara seperti Hong Kong, Australia, dan Inggris (Hardy & Woodcock, 2015; Malinen & Savolainen, 2012; Walton & Nel, 2012).

Kepala sekolah dan guru berkeyakinan dan senantiasa meminta kerjasama dengan orang tua dari siswa berkebutuhan khusus untuk sama-sama bersabar mendidik siswa berkebutuhan khusus. Mereka menganggap bahwa disamping ada sejumlah keterbatasan, siswa yang berkebutuhan khusus memiliki kelebihan dibandingkan dengan anak-anak normal lainnya. Inilah merupakan dinamika pendidikan sekaligus pula sebagai tantangan penerapan manajemen pendidikan inklusif yang efektif.

Rouse (2007) mengatakan bahwa pendidikan inklusif yang efektif tidak hanya dilandaskan kepada pengetahuan guru namun pula dipengaruhi oleh keyakinan dan sikap guru. Walaupun para guru bekerja dengan dukungan yang tidak mencukupi, sumber daya yang tidak memadai, kurangnya biaya untuk pelatihan, dan kurangnya keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja dengan siswa berkebutuhan khusus, akan tetapi dengan sikap positif mereka tetap memperlihatkan antusiasme dan kesediaan untuk melakukan tugas mereka. Inilah kekuatan SD Gunung Sari Dalam sebagai sekolah inklusif. Hal ini berbeda dengan fakta di negara lain, di mana peneliti diantaranya Baily et al (2015) sudah menemukan bahwa guru tidak siap untuk bekerja menuju inklusif sebab kurangnya sarana prasarana pendukung serta sikap negatif guru.

Taylor dan Ringlaben (2012) menjelaskan bahwa dengan adanya pendidikan inklusif mengakibatkan tantangan baru bagi manajemen pendidikan inklusif khususnya guru, yakni dalam hal melaksanakan perubahan yang signifikan

terhadap program pendidikan dan mempersiapkan para guru untuk menghadapi seluruh kebutuhan peserta didik baik yang berkebutuhan khusus ataupun yang bukan berkebutuhan khusus. Taylor dan Ringlaben juga mengutarakan tentang pentingnya sikap guru terhadap pendidikan inklusif, yakni guru dengan sikap yang lebih positif terhadap inklusif akan lebih dapat untuk mengatur instruksi dan kurikulum yang digunakan untuk peserta didik berkebutuhan khusus, serta guru dengan sikap yang lebih positif ini bisa mempunyai pendekatan yang lebih positif untuk inklusif.

#### 5. Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan Inklusif SDN Gunung Sari Dalam

Menurut Garnida bahwa perencanaan manajemen sarana dan prasarana diawali dengan menganalisis kebutuhan sarana-prasarana. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh sekolah untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran (2016:93). Sejalan dengan hal tersebut, pendidikan inklusif di SD Gunung Sari Dalam melakukan perencanaan manajemen sarana dan prasarana diawali dengan melaksanakan analisis kebutuhan. Hal ini dimaksudkan agar sarana yang tersedia bisa bermanfaat dan bisa dimanfaatkan oleh semua peserta didik berkebutuhan khusus sesuai dengan keadaan dan karakternya. Analisis kebutuhan sarana mengikutsertakan setiap guru termasuk guru pembimbing khusus. Analisis kebutuhan fasilitas pembelajaran dari guru dan guru pembimbing khusus, diberikan kepada koordinator fasilitas dan infrastruktur sekolah untuk diseleksi selaras dengan skala prioritas tingkat kebutuhan siswa dan diselaraskan dengan alokasi biaya yang ada.

Proses pengadaan fasilitas pembelajaran yang dimiliki oleh sekolah dilaksanakan melalui cara yang berbeda-beda. Mayoritas fasilitas pembelajaran yang dimiliki oleh sekolah didapatkan dengan cara membeli. Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur adalah faktor pendukung dalam implemetasi

manajemen sekolah. Sarana prasarana pembelajaran yang tersedia mencakup ruang kelas, perpustakaan, sarana prasarana olahraga, tempat ibadah, kantin serta toilet, wifi, UKS, ruang ekstrakurikuler, dan lain-lain.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan inklusif di SDN Gunung Sari Dalam dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari komponen-komponen manajemen yang dapat terlaksana semestinya, yaitu manajemen siswa, manajemen kurikulum, manajemen pembelajaran, manajemen tenaga pendidik, manajemen sarana dan prasarana. Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu faktor budaya, politik, sumber daya manusia. Pelaksanaan pendidikan inklusif bisa dievaluasi dengan suatu indeks yang dinamakan index for inclusion (Ainscow, 2010). Indeks inklusif ini dibangun dari tiga dimensi, yakni (1) dimensi budaya (*creating inclusive cultures*), (2) dimensi kebijakan (*producing inclusive policies*), dan (3) dimensi praktik (*evolving inclusive practices*). Masing-masing dimensi dibagi dalam dua seksi, yakni dimensi budaya meliputi seksi membangun komunitas (*building community*) dan seksi membangun nilai-nilai inklusif (*establishing inclusive values*). Dimensi kebijakan meliputi seksi pengembangan tempat untuk semua (*developing setting for all*) dan seksi melakukan dukungan untuk keberagaman (*organizing support for diversity*). Sedangkan dimensi praktik meliputi seksi belajar dan bermain bersama (*orchestrating play and learning*) dan seksi mobilisasi berbagai sumber (*mobilizing resources*).

## **SIMPULAN**

Manajemen Pendidikan Inklusif di SD Gunung Sari Dalam dilaksanakan sesuai

## **DAFTAR PUSTAKA**

dengan tahapan-tahapan yang semestinya. Manajemen siswa dimulai dengan adanya perencanaan penerimaan siswa baru melalui aktivitas analisis kebutuhan berupa jumlah siswa, aktivitas kesiswaan. Pelaksanaannya melalui jalur inklusif, akan tetapi identifikasi dan asesmen pihak sekolah tidak melibatkan tenaga ahli. Sekolah menggunakan kurikulum 2013 yang disesuaikan dengan keadaan siswa. Sementara itu, dalam program pembelajaran individual, sekolah tidak melibatkan orang tua, psikolog, dokter dan pihak terkait lainnya dalam perencanaan dan penyusunan program. Adapun manajemen proses pembelajaran dimulai dengan menganalisis SKL dan KD serta penyusunan RPP yang disesuaikan. Proses pembelajaran di kelas inklusif dilakukan sejalan dengan RPP. Guru juga menyeimbangkan konteks pembelajaran dan evaluasi dengan kondisi siswa berkebutuhan khusus. Selain itu, manajemen tenaga pendidik khusus dimulai dengan mendata kebutuhan guru, rekrutmen dan seleksi yang sesuai dengan latar belakang pendidikan luar biasa. Pembagian tugas guru pembimbing khusus berpijak pada kesepakatan dan koordinasi antara guru pembimbing khusus dengan tim pendidikan inklusif. Manajemen sarana dan prasarana dilakukan melalui perencanaan berdasarkan analisis kebutuhan dan pengadaan sampai mencukupi proses pembelajaran.

Manajemen pendidikan inklusif di sekolah masih kurang dalam melibatkan para tenaga ahli yang terkait dengan anak berkebutuhan khusus seperti psikolog, dokter, akademisi, maupun spesifik lainnya. Dengan demikian, maka diharapkan demi semakin memperlancar manajemen pendidikan inklusif hendaknya melibatkan para ahli tersebut, sehingga belum terbentuk kekuatan kolaborasi yang potensial dalam mendorong penerapan pendidikan inklusif.

Ainscow, M., P. Farrell, D. Tweddle. (2005). *Developing policies for inclusive education: a study of the role of local education authorities.*

- International Journal of Inclusive Education, 4 (3), 211-229.
- Amirin, M. Tatang. (2010). *Manajemen pendidikan*. Yogyakarta: UNY Pres
- Anwar, Herson. (2018). Implementation of education management standard in the guidance of private Islamic high school. *Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 75-86.
- Arar, Khalid and Muhammed Abu Nasra. (2020). Linking school-based management and school effectiveness: the influence of self-based management, motivation and effectiveness in the Arab education in Israel Khalid Arar & Muhammad Abo-Nasrah linking school-based management and school effectiveness: the influence of self-based management, motivation and effectiveness in the Arab education in Israel. *Educational Management Administration & Leadership*, 48(1), 186-204.
- Asyhabuddin. (2008). Difabilitas dan pendidikan inklusif: kemungkinannya di STAIN Purwokerto. *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan*, 13(3), 406-519.
- Bailey, L., Nomanbhoy, A., & Tubpun, T. (2015). Inclusive education: teacher perspectives from Malaysia. *International Journal of Inclusive Education*, 19(5), 547-559.
- Berry, R. A. W. (2006). Inclusion, power, and community: teachers and students interpret the language of community in an inclusion classroom. *American Educational Research Journal*, 43, 3, 489-529.
- Dacholfany, M. Ihsan, Eko Susanto, Andi Noviandi. (2018). Leadership and management of education institutions in improving human resources in Indonesia. *American Journal of Economics and Business Management*, 1(3), 38-55.
- Garnida, Dadang. (2015). *Pengantar Pendidikan inklusif*. Bandung: Refika Aditama.
- Hardy, I., & Woodcock, S. (2015). Inclusive education policies: discourses of difference, diversity and deficit. *International Journal of Inclusive Education*, 19(2), 141-164.
- Ilahi, Muhammad Takdir. (2013). *Pendidikan inklusif: konsep dan aplikasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Leatherman, J. M., and Niemeyer, J. A. (2005). Teachers' attitudes toward inclusion: factors influencing classroom practice. *Journal of Early Childhood Teacher Education*, 26:1, 23-36.
- Malinen, O.P., & Savolainen, H. (2012). The directions of finnish teacher education in the era of the revised act on basic education. In *Future Directions for Inclusive Teacher Education: An International Perspective*. London: Routledge.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldana. (2014). *Qualitative data analysis, a methods sourcebook*. Thousand Oaks, California, United States: Sage Publications, Inc.
- Morgan, Lorna Novlette Wilson. (2015). The influence of school leadership practices on classroom management, school environment, and academic underperformance. Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy. Washington: Walden University.
- Mudjito, AK., Harizal., H dan Elfindri. E. (2014). *Pendidikan inklusif: tuntunan untuk guru, siswa dan*

- orang tua anak berkebutuhan khusus dan layanan khusus. Jakarta: Baduose Media.
- Pikiran Rakyat. 2015. 167.000 anak berkebutuhan khusus belum terlayani pendidikan. <https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-01237897/167000-anak-berkebutuhan-khusus-belum-terlayani-pendidikan>
- Purwandari. 2009. Pendidikan inklusif: masalah ketenagaan dan peran serta perguruan tinggi dalam penyelenggaraan sekolah inklusif. Makalah disampaikan dalam Temu Ilmiah Nasional Jurusan PLB se-Indonesia di UNY dengan tema Manajemen Pendidikan Inklusif di Indonesia, pada Tanggal 1–3 Agustus 2009 yang dilaksanakan di Hotel Grage, Jalan Sosrowijayan 242 Yogyakarta.
- Rouse, M. (2007). Enhancing effective inclusive practice: knowing, doing and believing. *Kairaranga*, 7, 8-13.
- Sagala, Syaiful. (2009). Manajemen strategik dalam peningkatan mutu pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- Sharma, U., Forlin, C., Deppeler, J., & Guang-xue, Y. (2013). Reforming teacher education for inclusion in developing countries in the Asia Pacific Region. *Asian Journal of Inclusive Education*, 1(1), 3.
- Subagya. 2012. Analisis kebutuhan rintisan implementasi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif (SPPI) Propinsi Jawa Tengah tahun 2010. *Jurnal Rehabilitasi & Remediasi*, 21 (1), 19-28.
- Sutrisno. (2012). Signifikansi pendidikan inklusi dalam mewujudkan pendidikan untuk semua. *Mukaddimah*, 18 (1), 31-40.
- Tarmansyah. (2009). Inklusi pendidikan untuk semua. Jakarta: Depdiknas.
- Taylor, R. W. and Ringlaben, R. P. (2012). Impacting pre-service teachers' attitudes toward inclusion. *Higher Education Studies*, 2(3), 16-23.
- Walton, E., & Nel, N. (2012). What counts as inclusion? *Africa Education Review*, 9 (1), 1-26.
- Yusuf, Munawir, Salim Choiri, A., dan Subagya. (2013). Pendidikan kompensatoris anak berkebutuhan khusus. Surakarta: Konsorsium Sertifikasi guru.